



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS SITUS JUDI
ONLINE OLEH PEGAWAI NEGARA (STUDI PUTUSAN PN JAKARTA
SELATAN NO. 279/PID.SUS/2025/PN JKT.SEL)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Galuh Ayu Herlingga

221003742019121

SEMARANG

TAHUN 2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS SITUS JUDI ONLINE OLEH
PEGAWAI NEGARA (STUDI PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN
NO.279/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
GALUH AYU HERLINGGA
NPM : 221003742019121

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

SRI SETIAWATI, SH. M.HUM
NUPTK : 2453741642230072

Anggota,

ABDUL KHOLIQ, SH, MH
NUPTK : 1644743644130112

Anggota,

PROF. DR. SRI MULYANI, SH, MHUM
NUPTK : 1445740641130072



Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. ROY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap oknum pegawai negara yang melakukan pelanggaran berupa perlindungan terhadap operasional situs judi online. Fokus utama penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 279/Pid.Sus/2025/PN JKT SEL. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan pengadilan tersebut, didukung oleh bahan hukum sekunder berupa UU Nomor 1 Tahun 2024 Atas Perubahan Kedua UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan ini menerapkannya pertanggungjawaban pidana Turut Serta (Deelneming) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan perbuatan membantu/membiarkan akses judi online (ITE) merupakan perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri, meskipun dilakukan oleh subjek hukum yang sama. Pertimbangan hukum Majelis Hakim mengaitkan peran terdakwa sebagai pegawai negara yang menyalahgunakan kewenangan demi mendapatkan keuntungan dari kegiatan melakukan penjagaan situs perjudian ilegal.

Kata Kunci: UU ITE, Pegawai Negara, Judi Online, Putusan PN Jakarta Selatan

ABSTRACT

This research aims to analyze the application of criminal law against state officials who committed violations in the form of protecting online gambling site operations. The primary focus of this study is the South Jakarta District Court Decision Number 279/Pid.Sus/2025/PN JKT SEL. This study employs a normative legal research method with a case study and statutory approach. The primary legal materials used are the court decision itself, supported by secondary legal materials such as Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), as well as the Indonesian Criminal Code (KUHP). The research findings indicate that the panel of judges in this decision applied the principle of criminal liability for Complicity (Deelneming) as regulated in Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code. The act of assisting or allowing access to online gambling (ITE) is considered an independent act, even when committed by the same legal subject. The judges' legal considerations linked the defendant's role as a state official who abused their authority to gain profit from the activity of protecting illegal gambling sites.

Keywords: ITE Law, State Official, Online Gambling, South Jakarta District Court Decision.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penegakan Hukum (<i>Law Enforcement</i>).....	9
a.1. Pengertian Penegakan Hukum.....	9
a.2. Tujuan Penegakan Hukum.....	11
a.3. Asas- asas Penegakan Hukum.....	12
B. Tinjauan Umum tentang Perjudian <i>Online</i> (Dasar Hukum).....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Metode Pendekatan.....	22
B. Spesifikasi Penelitian.....	23
C. Sumber Data.....	23
D. Metode Pengumpulan Data.....	25
E. Metode Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	26
A. Penegakan Hukum pada Kasus Situs Judi <i>Online</i> yang dilakukan oleh Pegawai Aktif Kominfo.....	26
B. Pertimbangan Hakim dalam memberikan Amar Putusan terhadap Kasus Judi <i>Online</i> yang dilakukan oleh Pegawai Kominfo.....	39

DAFTAR PUSTAKA